

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki abad ke 21 seluruh dunia mempersiapkan untuk memasuki abad modernisasi, dimana pekerjaan harus dikerjakan dengan lebih cepat karena semua pekerjaan dipacu oleh waktu dan tentu saja, setiap orang harus mampu berpikir dan bertindak secepat mungkin. Setiap individu dituntut untuk selalu sempurna dan memiliki kemampuan lebih dari orang lain sehingga membuat dirinya lebih menonjol dari orang lain.

Indonesia harus membentuk kualitas individu yang baik dan untuk meningkatkan kualitas bangsa yang utuh tanpa membeda-bedakan individu. Individu tersebut harus mampu bersaing dengan orang lain dan mampu bertahan di tengah persaingan walaupun individu tersebut memiliki cacat.

Cacat seseorang hingga saat ini masih sering menjadi kendala untuk berhubungan dengan orang lain. Di Indonesia, hampir tidak ada aksesibilitas ke ruang-ruang publik yang membuat penyandang cacat semakin merasa terpinggirkan (Kompas, 19 Juni 2002).

Para penyandang cacat tidak mempunyai fasilitas khusus yang membantu mereka untuk hidup di lingkungan sosial, seperti tempat penyeberangan khusus bagi kaum tuna netra dan yang menggunakan kursi roda, kendaraan umum bagi yang lumpuh dan berkursi roda. Tempat-tempat umum hampir seluruhnya hanya memberikan pengumuman melalui pengeras suara bukan dengan tulisan yang ditulis

dengan alat elektronik agar dapat dimengerti oleh penyandang tuna rungu. Stasiun televisi pernah mencoba menggunakan bahasa isyarat sebagai alat bantu bagi para tuna rungu tetapi tidak bertahan lama (Kompas, 3 Desember 2001).

Namun demikian, masih ada pihak tertentu yang memiliki kepedulian. Misalnya, sebuah yayasan di kota Medan membentuk suatu badan khusus yang beranggotakan para penyandang cacat yaitu BPOC (Badan Pengembangan Olahraga Cacat). Badan tersebut bergerak di bidang olahraga, dimana para penyandang cacat dilatih menjadi atlet sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Para atlet berprestasi diikutsertakan pada kejuaraan nasional ataupun internasional.

Banyak orang menganggap dan berpendapat bahwa para penyandang cacat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memegang suatu jabatan tertentu dan lebih banyak memerlukan fasilitas khusus dibanding yang tidak cacat. Pemerintah telah membuat peraturan khusus untuk penyandang cacat di bidang pekerjaan, tetapi pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dunia bisnis seringkali tidak menguntungkan bagi penyandang cacat, karena para penyandang cacat tidak mendapatkan perhatian bahkan cenderung terlupakan. Di Indonesia, sekitar 80 % dari 20 juta orang penyandang cacat tidak memiliki pekerjaan. Artinya para penyandang cacat terpaksa harus menggantungkan hidupnya dari bantuan keluarga atau institusi tertentu, yang secara tidak langsung mempengaruhi produktivitas kerja nasional (www.e-psikologi.com, 27 Agustus 2002).

Pentingnya pekerjaan bagi individu yang cacat maupun yang tidak cacat tidak hanya dilihat dari masalah keuangan saja tetapi pekerjaan memiliki makna